

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Lahan

Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia (UU RI No.41 Tahun 2009 Bab I pasal 1).

Lahan memiliki peran sangat penting bagi kehidupan manusia. Lahan digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia baik yang bersifat material serta spiritual. Salah satu faktor produksi adalah lahan. Lahan sebagai wadah atau tempat dihasilkannya suatu produk. Banyak sedikit produk yang dihasilkan dapat dipengaruhi oleh luas sempitnya lahan yang digunakan (Supriyanto, 2014).

Pertanian merupakan sektor terpenting sebagai penopang untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak, khususnya kebutuhan hidup makanan pokok manusia sebagai wujud peningkatan kesejahteraan bangsa dan negara (Lukri, 2016). Di bidang pertanian, lahan merupakan sumber daya yang sangat penting, baik bagi petani maupun bagi pembangunan pertanian. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa di Indonesia kegiatan pertanian masih bertumpu pada lahan (land based agriculture activities) (Zuhri, 2018).

Lahan pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian. Ketersediaan lahan merupakan faktor utama dalam pengembangan sektor pertanian karena berhubungan dengan kuantitas dan kualitas jenis tanaman yang

ditanam sebagai upaya memperoleh keuntungan. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan cepatnya laju pembangunan menyebabkan kebutuhan lahan meningkat, hal ini berimbas pada berkurangnya ketersediaan lahan. Selain itu juga dipengaruhi perubahan kebijakan program atau rencana pembangunan (Ayu, 2018)

B. Penggunaan Lahan

Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil (Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah)

Tata Guna Lahan menurut Undang-Undang Pokok Agraria adalah struktur dan pola pemanfaatan tanah, baik yang direncanakan maupun tidak, yang meliputi persediaan tanah, peruntukan tanah, penggunaan tanah dan pemeliharannya. Penggunaan lahan merupakan wujud dari kegiatan manusia terhadap pemanfaatan lahan secara optimal pada satu waktu.

Penggunaan lahan adalah segala campur tangan manusia, baik secara menetap atau berpindah-pindah terhadap suatu kelompok sumberdaya alam dan sumberdaya buatan, yang secara keseluruhan dapat disebut lahan dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan baik material maupun spiritual, maupun kebutuhan kedua-duanya (Nasution, 2017)

Penggunaan lahan terbagi menjadi dua yaitu lahan pertanian dan lahan non pertanian. Lahan pertanian adalah lahan yang digunakan untuk usaha segala bidang pertanian seperti perkebunan, perikanan dan peternakan. Lahan yang digunakan sebagai kegiatan non pertanian adalah lahan non pertanian. Lahan non pertanian adalah sebagai berikut (Fitrianingsih, 2017) :

1. Lahan perumahan yakni lahan untuk tempat tinggal atau rumah, pemakaman, tempat rekreasi.
2. Lahan perusahaan yakni penggunaan lahan untuk pasar, per tongkrongan, gudang, bank, bioskop, hotel, stasiun
3. Lahan industri yakni penggunaan lahan untuk pabrik, percetakan
4. Lahan untuk jasa yakni penggunaan lahan untuk kantor kantor pemerintahan
5. Tempat ibadah, rumah sakit, sekolah dan fasilitas umum.

Kebutuhan akan lahan untuk pembangunan fasilitas umum, pemukiman, industri semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Hal ini berimplikasi pada perubahan penggunaan lahan yang berdampak pada berkurangnya ketersediaan lahan pertanian. Adapun bentuk penggunaan lahan menurut V.F.L Polle et al (1977) yang terbagi menjadi 7 kategori bentuk lahan yaitu :

1. Lahan kosong atau pertanian, yaitu tanaman musiman, perkebunan, hutan, perikanan, kulturil (tempat pembangunan dan tempat perombakan).
2. Permukiman yakni baik moderen tersendiri, modern setengah tersendiri, moderen berjajar.
3. Perdagangan dan entertainment (hiburan) perdagangan yakni toko pusat perbelanjaan, department store, pasar, bank, jasa profesional (dokter notaris

arsitek), salon, rumah makan, entertainment (hiburan) yakni hotel penginapan, klab malam, bioskop

4. Industri yakni industri kimia, farmasi, industri tekstil, timbunan air gudang pembangkit listrik.
5. Transportasi yakni jalan, jembatan, kereta api, stasiun.

UU No.7 Tahun 2014 mengklasifikasikan jasa menjadi 11 kategori yakni : jasa bisnis, jasa distribusi, jasa pariwisata, jasa transportasi, jasa komunikasi, jasa rekreasi, jasa keuangan, jasa pendidikan, jasa lingkungan hidup, jasa kesehatan dan sosial.

C. Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan atau konversi lahan merupakan berubahnya pemanfaatan suatu lahan dari pemanfaatan sebelumnya, sehingga menyebabkan permasalahan yang timbul banyak terkait dengan kebijakan tata guna lahan. Secara umum alih fungsi lahan menyangkut perubahan dalam pengalokasian sumberdaya lahan dari penggunaan satu ke penggunaan lainnya. Hal ini sering terjadi di wilayah sekitar perkotaan termasuk pinggiran kota. Karena untuk mendukung perkembangan sektor industri dan jasa (Amir, 2018)

Alih fungsi lahan merupakan situasi yang sulit dihindari. Disebabkan pemanfaatan lahan non pertanian atau lahan terbangun lebih banyak memberikan keuntungan finansial dibandingkan dengan pemanfaatan lahan pertanian. Hal ini tercermin pada nilai *land rent* untuk kegiatan pertanian yang cenderung lebih kecil dibandingkan untuk kegiatan non pertanian (Dhika, 2013)

Alih fungsi lahan pertanian adalah salah satu fenomena yang cukup penting untuk diperhatikan, karena berkaitan dengan masyarakat terhadap sektor pertanian khususnya dalam pangan. Maraknya terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian penyebabnya dapat dikatakan sebagai hal multidimensi. Sedangkan lahan sendiri sudah bersifat multifungsi. Alih fungsi lahan banyak terjadi pada saat ini. Hal ini merupakan konsekuensi dari meningkatnya jumlah penduduk serta maraknya pembangunan menyebabkan peningkatan permintaan dan penawaran yang tidak terbatas sedangkan persediaan lahan yang terbatas (Purwaningsih, 2010)

Alih fungsi lahan berkaitan erat dengan prinsip ekonomi, pengguna akan selalu memaksimalkan lahannya. Kegiatan kegiatan yang dianggap tidak produktif dan tidak menguntungkan selalu akan cepat tergantikan dengan kegiatan lain yang lebih produktif dan menguntungkan persaingan terjadi untuk pemanfaatan yang paling menguntungkan sehingga dapat mendorong terjadinya perubahan pemanfaatan lahan (Kustiawan, 1997)

Proses alih fungsi lahan pada umumnya didahului oleh adanya proses alih penguasaan lahan. Dalam kenyataannya, dibalik proses alih fungsi lahan umumnya terdapat proses memburuknya struktur penguasaan sumberdaya lahan. Permasalahan di seputar proses alih fungsi lahan adalah (1) proses yang asimetrik antara pihak yang melepas dengan yang menerima hak penguasaan lahan, (2) kecenderungan semakin terkonsentrasinya struktur penguasaan lahan pada kelompok masyarakat tertentu (distribusi penguasaan yang semakin memburuk) dan (3) bertambahnya kelompok masyarakat tanpa lahan (Rustiadi, 2016)

Menurut Kustiawan (1997) menyatakan bahwa setidaknya ada tiga faktor penting yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan sawah :

1. Faktor Internal

Merupakan faktor yang lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian penggunaan lahan.

2. Faktor Eksternal

Merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan (fisik maupun spasial) demografi maupun ekonomi.

3. Faktor Kebijakan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Bab I Pasal 1 menyatakan bahwa izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan merawat bangunan. Hal ini merupakan aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian

Lahan pertanian yang paling rentan terhadap alih fungsi lahan adalah lahan sawah (Iqbal dan Sumaryanto, 2007) hal ini dikarenakan :

1. Kepadatan penduduk di pedesaan yang memiliki agroekosistem lahan kering, sehingga tekanan penduduk atas lahan juga tinggi
2. Daerah persawahan banyak lokasinya berdekatan dengan perkotaan

3. Akibat pola pembangunan di masa sebelumnya, infrastruktur persawahan pada umumnya lebih baik daripada wilayah lahan kering
4. Pembangunan sarana dan prasarana permukiman, kawasan industri dan sebagainya cenderung berlangsung cepat di wilayah bertopografi datar, dimana pada wilayah topografi seperti Pulau Jawa ekosistem pertaniannya didominasi persawahan

D. Pola Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan dibagi menjadi tujuh pola (Sihaloho, 2007) yaitu :

1. Alih Fungsi Lahan Gradual Berpola *Sporadis*

Alih Fungsi Gradual Berpola *Sporadis* dipengaruhi faktor utama yaitu lahan yang kurang produktif atau tidak produktif dan karena keterdesakan ekonomi pelaku yang mengalihfungsikan lahan, sebagai petani, warga membutuhkan lahan yang produktif, setelah menjual tanahnya warga membeli tanah lain dan ada juga yang tidak dapat membeli lagi karena uang hasil penjualan tanah dimanfaatkan oleh keluarga untuk kebutuhan yang mendesak.

2. Alih Fungsi Lahan Sistematis Berpola (*enclave*)

Alih Fungsi Lahan Sistematis Berpola “*enclave*” yang dimaksud adalah sekompartemen tanah yang terkonversi secara serentak. Pemilik tanah dapat terdiri dari beberapa orang. Dikarenakan lahan yang kurang produktif sehingga konversi dilakukan secara serempak untuk meningkatkan nilai tambah

3. Alih Fungsi Lahan Adaptasi Demografis (*Population Growth Driven Land Conversion*)

Alih fungsi lahan tidak dapat dihindari dalam suatu wilayah tertentu karena lahan akan dialihfungsikan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal atau mendirikan perumahan. Pertumbuhan penduduk baik secara alami atau natural maupun karena migrasi masuk lebih besar dari keluar mengakibatkan lahan-lahan terkonversi. Alih fungsi lahan yang diakibatkan oleh faktor penggerak utama pertumbuhan penduduk disebut dengan konsep adaptasi demografi. Adanya pertumbuhan penduduk menjadikan alih fungsi lahan lahan dijadikan sebagai tempat tinggal atau perumahan

4. Alih Fungsi Lahan disebabkan oleh Masalah Sosial (*Social Problem Driven Land Conversion*)

Keterdesakan ekonomi dan perubahan kesejahteraan adalah dua faktor utama penggerak melakukan konversi lahan

5. Alih Fungsi Lahan “Tanpa Beban”

Faktor utama dari pola alih fungsi lahan tanpa beban ini adalah untuk mengubah nasib hidup yang lebih baik dari keadaan saat ini dan ingin ke luar dari kampung atau kelurahan

6. Alih Fungsi Lahan Adaptis Agraris

Pola alih fungsi lahan adaptis agraris terjadi karena keterdesakan ekonomi dan keinginan untuk berubah dari masyarakat dengan tujuan meningkatkan hasil pertanian. Dikatakan berpola adaptis agraris jika warga memiliki tanah yang relatif kurang produktif ingin meningkatkan hasil pertaniannya dengan cara menjual tanah yang kurang produktif dan membeli tanah yang relatif lebih bagus.

7. Alih Fungsi Lahan Multi Bentuk atau Tanpa Bentuk

Pola alih fungsi lahan multi bentuk ini merupakan alih fungsi lahan diakibatkan oleh berbagai faktor, namun secara khusus faktor yang dimaksud adalah faktor peruntukkan untuk perkantoran, sekolah, koperasi, perdagangan, termasuk sistem waris yang tidak spesifik dijelaskan dalam pola alih fungsi lahan adaptasi demografi

E. Teori *Trickle Down Effect*

Teori *trickle down effect* merupakan salah satu topik penting dalam pembangunan ekonomi, terutama di negara-negara yang sedang berkembang (Laksani, 2010). Teori ini pertama kali digagas oleh Albert Otto Hirschman pada 1954. Teori *trickle down effect* menjelaskan bahwa kemajuan yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menetes ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi pertumbuhan ekonomi yang merata.

Trickle Down Effect merupakan salah satu pendekatan dalam strategi tidak langsung pembangunan ekonomi untuk pemerataan kesejahteraan yang menekankan pada munculnya pertumbuhan ekonomi. Dikatakan tidak langsung karena proses pemerataan kesejahteraan dilakukan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi pada sektor utama dan kemudian sektor utama tersebut akan menyebarkan hasil pertumbuhan ekonomi tersebut ke sektor lainnya.

Proses penyebaran tersebut diharapkan akan membawa perbaikan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diutamakan pada titik asalnya sebelum disebarkan ke berbagai tempat lainnya. Hirschman menggunakan istilah Titik Pertumbuhan (*Growing Point*) atau Pusat Pertumbuhan (*Growing Centre*). Di suatu

negara terdapat beberapa titik pertumbuhan, di mana industri berkelompok berada pada titik pertumbuhan tersebut. Hal itu karena diperoleh beberapa manfaat dalam bentuk efisiensi biaya yang dikeluarkan oleh industri yang bersangkutan. Hirschman juga menyarankan agar membentuk lebih banyak titik-titik pertumbuhan supaya dapat menciptakan pengaruh-pengaruh penyebaran pembangunan yang efektif. Kesempatan investasi, lapangan kerja, dan upah buruh relatif tinggi lebih banyak terdapat di pusat-pusat pertumbuhan. Oleh karena itu, investasi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang diutamakan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dalam *trickle down effect*. Dengan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi yang ada, investasi selanjutnya diharapkan mampu menciptakan kesempatan kerja baru, mengurangi tingkat pengangguran, dan selanjutnya mampu

F. Ketahanan Pangan

Berdasarkan UU RI No 18 Tahun 2012 Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman

Pangan adalah kebutuhan primer atau dasar yang paling penting bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup dan menjalani aktivitas kegiatan sehari-hari. Pangan sebagai sumber zat gizi (karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral dan air) merupakan landasan utama untuk mencapai kesehatan dan kesejahteraan

sepanjang siklus kehidupan. Pangan telah dikelompokan menurut berbagai cara yang berbeda yakni : padi padian, akar-akaran umbi-umbian dan pangan berpati, kacang-kacangan dan biji-bijian berminyak, sayur-sayuran, buah-buahan, pangan hewani, lemak dan minyak, gula dan sirup.

Undang No 18 tahun 2012, yang dimaksud dengan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

G. Indikator Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan rumah tangga dapat diukur menggunakan pangsa pengeluaran pangan. Penggunaan indikator pangsa pengeluaran pangan sebagai indikator komposit ketahanan pangan. Pangsa pengeluaran pangan layak dijadikan indikator ketahanan pangan karena mempunyai sifat hubungan yang erat dengan berbagai ukuran ketahanan pangan yaitu tingkat konsumsi keanekaragaman pangan, dan pendapatan serta memiliki ciri dapat diukur dengan angka, cukup sederhana untuk memperoleh dan menafsirkannya, objektif, dan responsif terhadap perubahan-perubahan akibat adanya perubahan kondisi perekonomian, kebijakan dan program pembangunan. (Supriyanto, 2014).

Pangsa pengeluaran pangan adalah rasio pengeluaran untuk berbelanja pangan dan pengeluaran total rumah tangga dalam sebulan Pangsa pengeluaran rumah

tangga diperoleh dengan menggunakan data besarnya jumlah konsumsi pangan dan non pangan di tingkat rumah tangga.

Rawan pangan terjadi akibat dari alih fungsi lahan karena lahan pertanian telah berubah maka mengakibatkan penurunan hasil komoditas pertanian. Penduduk yang biasa mengandalkan hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhannya karena lahan dialihfungsikan maka lahan tersebut sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan, hal ini menyebabkan penduduk mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk membeli kebutuhan pangan dibandingkan kebutuhan non pangan.

Nilai pangsa pengeluaran pangan yang semakin rendah menandakan tingkat ketahanan pangan tahan pangan sebuah keluarga dan semakin sejahtera, semakin tinggi nilai pangsa pengeluaran pangan menandakan semakin rawan pangan.

H. Landasan Teori

Berdasarkan tinjauan pustaka maka dapat disusun landasan teori sebagai berikut

1. Lahan merupakan salah satu faktor produksi, tempat dihasilkannya produk pertanian yang memiliki sumbangan yang cukup besar terhadap usaha tani, karena banyak sedikitnya hasil produksi dari hasil usaha tani dipengaruhi oleh luas sempitnya lahan yang digunakan
2. Penggunaan lahan merupakan segala bentuk intervensi manusia, baik secara menetap ataupun berpindah-pindah terhadap suatu kelompok sumber daya alam dan sumber daya buatan, yang secara keseluruhan disebut lahan, dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan baik material maupun spiritual, maupun kebutuhan kedua-duanya.

3. Lahan pertanian merupakan bidang lahan yang diperuntukan untuk usaha pertanian, lahan yang selain sebagai persawahan dan tegalan merupakan lahan perkebunan. Lahan non pertanian merupakan lahan untuk usaha kegiatan non pertanian
4. Alih fungsi lahan atau konversi lahan merupakan berubahnya pemanfaatan suatu lahan dari pemanfaatan sebelumnya, sehingga menyebabkan permasalahan yang timbul banyak terkait dengan kebijakan tata guna lahan. Secara umum alih fungsi lahan menyangkut perubahan dalam pengalokasian sumberdaya lahan dari penggunaan satu ke penggunaan lainnya.
5. Pola Alih Fungsi Lahan terdapat 7 macam yaitu, alih fungsi lahan gradual berpola *sporadic*, alih fungsi lahan adaptasi demografi (*population growth driven land conversion*), alih fungsi lahan disebabkan masalah sosial (*social problem driven land conversion*), alih fungsi lahan tanpa beban, alih fungsi lahan adaptis agraris, alih fungsi lahan multi bentuk atau tanpa bentuk/pola
6. Ketahanan Pangan dengan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
7. Indikator ketahanan Pangan merupakan parameter untuk mengukur seberapa ketahanan pangan dalam setiap rumah tangga, terdapat dua indikator untuk mengukur ketahanan pangan yakni, indikator pangsa pengeluaran pangan (Maxwell *et.al* 2000).

$$PF_t = \frac{PPt}{TPt} \times 100\%$$

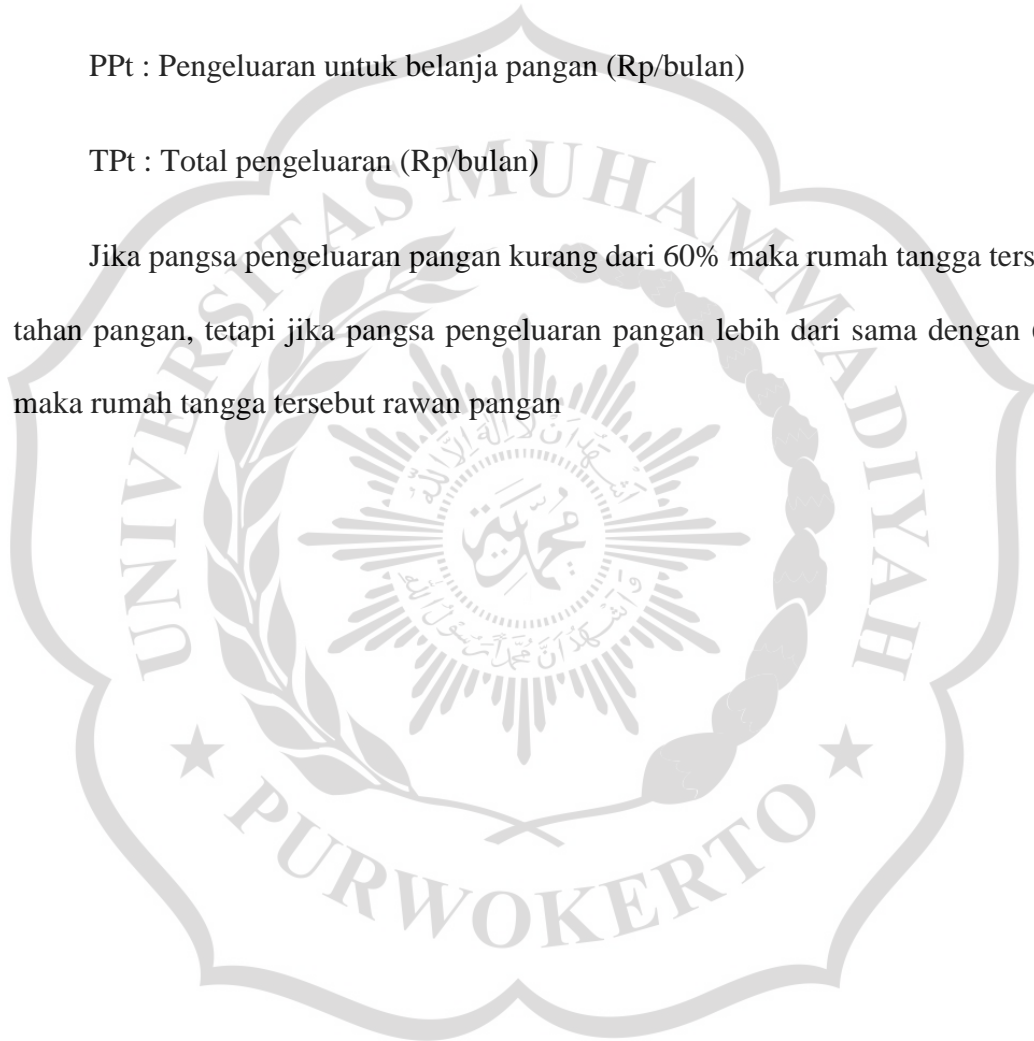
Keterangan :

PF_t : Pangsa Pengeluaran Pangan

PP_t : Pengeluaran untuk belanja pangan (Rp/bulan)

TP_t : Total pengeluaran (Rp/bulan)

Jika pangsa pengeluaran pangan kurang dari 60% maka rumah tangga tersebut tahan pangan, tetapi jika pangsa pengeluaran pangan lebih dari sama dengan 60% maka rumah tangga tersebut rawan pangan



I. Hasil Penelitian Relevan

Tabel 2.2Penelitian Relevan

No	Penulis dan Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Teguh Supriyanto (2014). Analisis Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga Tani Desa Mandiri Pangan di Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali	Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendapatan, jumlah anggota keluarga, umur kepala keluarga, pendidikan kepala keluarga terhadap pemenuhan ketahanan rumah tangga petani serta menganalisis rata-rata pengeluaran pangan antara rumah tangga tani yang ikut dan tidak ikut program desa mandiri pangan	Penelitian analisis tingkat ketahanan pangan rumah tangga tani desa mandiri ini menggunakan metode penelitian survei. Untuk menjelaskan pengaruh tingkat pendapatan, jumlah anggota keluarga, umur kepala keluarga, pendidikan kepala keluarga	Faktor pendapatan, jumlah anggota keluarga, umur kepala keluarga, pendidikan kepala keluarga, dan kemampuan memenuhi kebutuhan keuangan (Simpanan) berpengaruh terhadap tingkat ketahanan pangan rumah tangga. Rumah tangga tani ikut program mempunyai pangsa pengeluaran pangan yang lebih baik dibandingkan rumah tangga tani yang tidak ikut program
2	Yunastiti Purwaningsih, Sutomo, Nurul Istiqomah (2010). Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani di Karanganyar Jawa Tengah	Untuk mengidentifikasi sumber pendapatan rumah tangga serta menganalisis faktor yang mempengaruhi pengeluaran pangan dan aksesibilitas pangan rumah tangga petani padi yang tidak beralih fungsi lahan dan yang beralih fungsi	Penelitian ini menggunakan metode survei dengan analisis adalah rumah tangga petani padi yang tidak beralih fungsi lahan. Teknik analisis yang digunakan adalah deskripsi untuk mengidentifikasi sumber pendapatan rumah tangga.	Hasil penelitian mengenai sumber pendapatan rumah tangga menunjukkan sebagian besar rumah tangga tidak alih fungsi maupun alih fungsi lahan, mempunyai pendapatan utama dari usahatani dan wiraswasta. Rata-rata pendapatan sebulan dari usahatani untuk rumah tangga tidak alih fungsi lahan lebih besar dibanding rumah tangga alih fungsi. Alih fungsi lahan, umur,

				jumlah anggota rumah tangga dan aset signifikan berpengaruh terhadap aksesibilitas pangan rumah tangga, sedangkan pendapatan usahatani dan pendapatan rumah tangga tidak signifikan.
3	Cantika Diffa Ayundasari (2020). Kajian Tipologi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan di Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas	Untuk mengkaji tipologi dan faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan di Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas	Penelitian tipologi dan faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan di Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas menggunakan metode survei lapangan untuk mencari data sekunder dan data primer	Hasil penelitian ini adalah perubahan alih fungsi lahan di Desa Dukuhwaluh yaitu sebesar 26,094 Ha atau 14,235%. Faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan yakni faktor internal yang disebabkan karena tingkat ketergantungan, hasil pertanian yang mencukupi, keputusan mengalih fungsikan lahannya, adapun faktor eksternalnya yakni pemilik lahan menjual diakibatkan harga tanah yang tinggi. Tipologi alih fungsi lahan di Desa Dukuhwaluh yaitu Konversi Sistematis Berpola, Konversi Lahan sebagai Respon Penduduk, Konversi Multi Bentuk atau Tanpa Bentuk.
4	Anisa Nurpianti, Latri Wihastuti, Ike Yuli Andjani (2018).	Untuk mengetahui dampak alih fungsi lahan terhadap ketahanan pangan rumah tangga	Penelitian dampak alih fungsi lahan terhadap ketahanan pangan rumah tangga tani di Kecamatan Temon	Hasil kondisi di Kecamatan Temon sebelum alih fungsi lahan sebesar 87% rawan pangan, sedangkan sesudah alih fungsi lahan

	Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga Tani di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo	tani di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo	Kabupaten Kulon Progo menggunakan metode survei untuk mendapatkan data primer langsung dari lapangan.	sebesar 90% rawan pangan. Ketahanan pangan sebelum alih fungsi lahan sebesar 13% dan sesudah alih fungsi lahan sebesar 10%.
5	Amni Muzaenah (2021). Kajian Pola Alih Fungsi Lahan Dan Kondisi Ketahanan Pangan Kecamatan Kembaean Kabupaten Banyumas Tahun 2000 dan 2020	Untuk mengetahui besar alih fungsi lahan dan pola alih fungsi lahan serta kondisi ketahanan pangan sesudah terjadinya alih fungsi lahan	Penelitian kajian pola alih fungsi lahan dan tingkat ketahanan pangan Kecamatan Kembaran tahun 2000 dan 2020 menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan survei lapangan untuk mendapatkan data primer langsung dari lapangan	Hasil penelitian ini adalah telah terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian menjadi nonpertanian seluas 985,38% atau sebesar 3,26%, adapun terdapat tiga tipe pola alih fungsi lahan yaitu pola alih fungsi lahan adaptasi demografi, pola alih fungsi lahan multi bentuk atau tanpa bentuk dan pola alih fungsi lahan disebabkan masalah sosial. Alih fungsi lahan yang terjadi telah menyebabkan 70% penduduk masih mengalami kondisi tahan pangan dan 30% mengalami kondisi rawan pangan.

Penelitian Relevan. Teguh Supriyanto (2014), Yunastiti Purwaningsih, Sutomo, Nurul Istiqomah (2010). Cantika Diffa Ayndasari (2020), Anisa Nurpianti, Latri Wihastuti, Ike Yuli Andjani (2018)

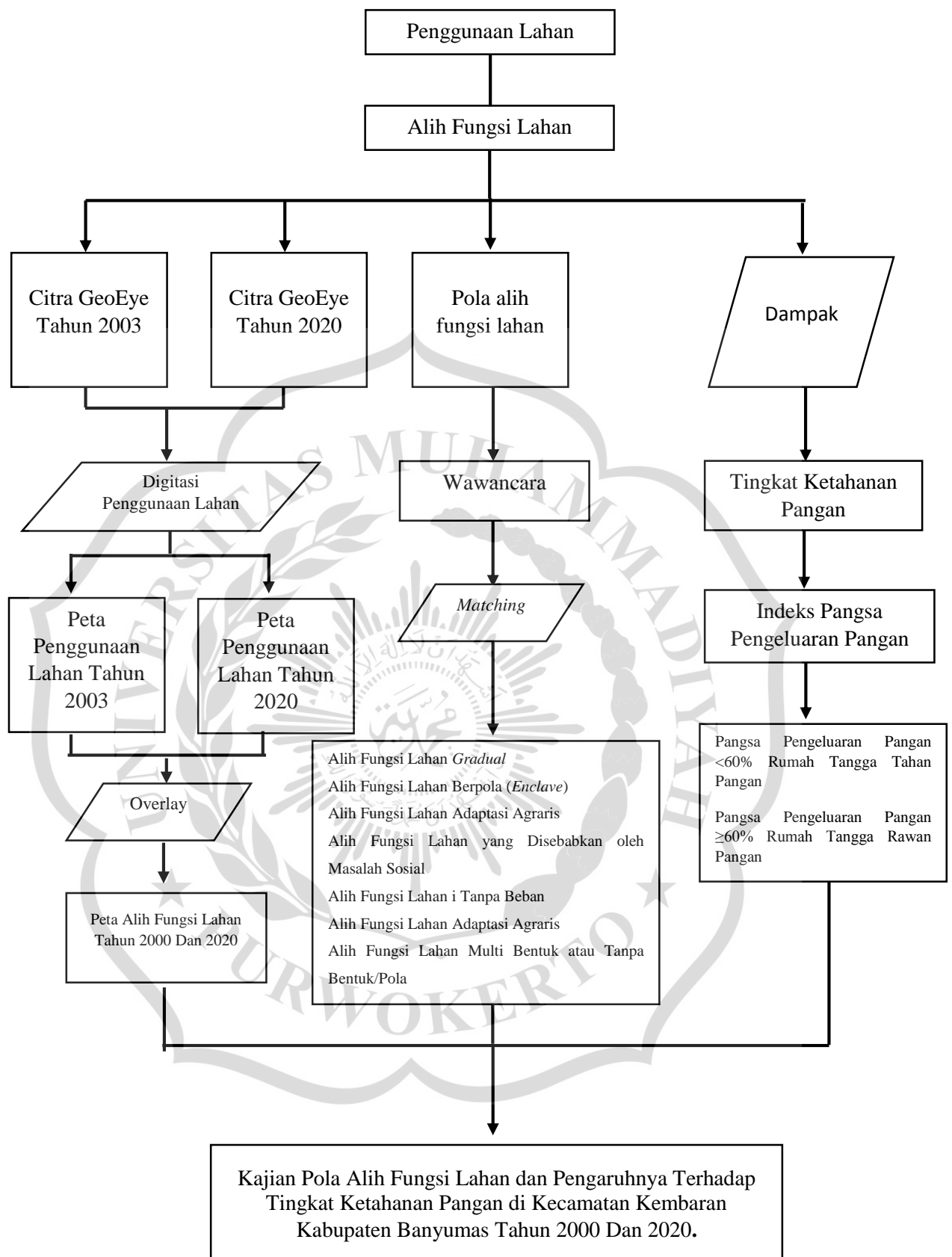
J. Kerangka Pikir

Penggunaan lahan di Kecamatan Kembaran dari tahun 2000 dan 2020 akhir mengalami perubahan. Perubahan tersebut terjadi karena adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian yang disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah penduduk sebagai pemenuhan kebutuhan untuk bermukim dan beraktivitas.

Dampak yang ditimbulkan dari alih fungsi atau konversi lahan ini adalah berkurangnya ketersediaan lahan dan menurunnya produksi pangan pertanian sehingga menyebabkan penduduk yang berprofesi sebagai petani dengan pendapatan yang diperoleh dari hasil pertaniannya menurun. Produksi pertanian ini berkaitan erat dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan pokok manusia.

Tingkat ketahanan pangan dapat dihitung dengan indeks pangsa pengeluaran pangan. Pangsa pengeluaran pangan dapat menggambarkan proporsi pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan. Pangsa pengeluaran pangan dipengaruhi oleh faktor pengeluaran pangan dan non pangan dalam 1 bulan. Terdapat dua dasar dalam pembuatan peta ini yaitu peta penggunaan lahan multitemporal tahun 2000 dan 2020, serta peta alih fungsi lahan Kecamatan Kembaran.

Hasil angket wawancara yang berisi data pola perubahan alih fungsi lahan dan jumlah pengeluaran pangan dan non pangan sesudah terjadinya alih fungsi lahan selanjutnya diolah dengan indeks pangsa pengeluaran pangan kemudian digolongkan menjadi dua kelas yaitu rumah tangga tahan pangan dan rawan pangan. Dari hasil tersebut maka diperoleh sesuai judul yaitu “Kajian Pola Alih Fungsi Lahan dan Tingkat Ketahanan Pangan di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Dan 2020”



Gambar 2.1 Kerangka Pikir